

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki konstitusi yang mengatur tentang kebebasan beragama. Kebebasan beragama di Indonesia dapat dilihat dari UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E ayat (1) dan (2) serta Pasal 29 ayat (1) dan (2):¹

Pasal 28E :

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali;
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.

Pasal 29 :

- (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu

Meski demikian, Indonesia merupakan negara dengan berbagai suku, ras, bahasa, profesi, keturunan, kultur, dan agama atau dapat dikatakan Indonesia menjadi negara yang beragam dengan masyarakat yang pruralisme dan multi agama.

Agama adalah suatu sistem ajaran tentang Tuhan, dimana penganut penganutnya melakukan tindakan-tindakan ritual, moral, atau sosial atas dasar aturan-aturan-Nya. Indonesia bukanlah negara agama, sebab negara Indonesia tidak didasarkan pada suatu agama tertentu, tetapi Indonesia mengakui eksistensi 6 agama, yaitu agama Islam,

¹ Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E dan Pasal 29.

Katolik, Protestan, Hindu, Budha, dan Khong Cu (*Confusius*)², yang tertera dalam PNPS no 1 tahun 1965. Namun pada tahun 2016 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengeluarkan Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang menyatakan bahwa MK mengakui seluruh kepercayaan yang ada di Negara Republik Indonesia.³ Islam merupakan salah satu agama yang diakui di Indonesia dan merupakan agama mayoritas penduduk Indonesia. Sebenarnya, masalah keyakinan terhadap suatu ajaran agama adalah urusan hati setiap manusia dan tidak bisa diintervensi siapa pun. Tapi mengubah, menambah, atau menghilangkan ajaran agama yang sudah ada dianut di Indonesia, bukanlah suatu hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi, karena itu adalah perbuatan menista suatu agama atau penodaan agama.

Persoalan mengenai Penistaan agama yang dilakukan seseorang terhadap agama lain semakin mendapatkan perhatian masyarakat dan aparat penegak hukum baik nasional maupun internasional seiring dengan meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan atas hak asasi manusia (HAM).⁴

Perbuatan penistaan agama memiliki dampak yang merendahkan harkat martabat manusia dan kemanusiaan. Penistaan agama bisa mendorong terjadinya kebencian kolektif, pengucilan, Penghasutan, diskriminasi, kekerasan, dan bahkan pada tingkat yang paling mengerikan, pembantian etnis. terhadap kelompok masyarakat budaya,

² Penetapan Presiden Republik Indonesia nomor 1/PNPS tahun 1965, penjelasan pasal demi pasal, pasal 1.

³ Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 97/PUU-XIV/2016.

⁴ Ahmad Najib Burhani, 2012, *Tiga Problem Dasar Dalam Perlindungan Agama-Agama Minoritas di Indonesia*, jurnal Ma'Arif Vol.7 No. 1, hlm 45.

etnis, ras, dan agama yang menjadi sasaran perbuatan penistaan agama. Pada keadaan inilah perbuatan tersebut dapat masuk kedalam perbuatan tindak pidana, karena status yang ia tuliskan berisi penistaan yang mana dapat dibaca oleh banyak orang.⁵

Ketentuan dalam, Pasal 156 a KUHP berbunyi, "Dipidana dengan pidana penjara selama – lamanya 5 tahun, barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan :⁶

- a. Yang ada pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. Dengan maksud agar orang tidak menganut agama apa pun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berbicara tentang delik agama dalam KUHP yang berlaku sekarang hanya dijumpai satu pasal saja, yaitu Pasal 156 a KUHP. Pasal ini lebih terkenal dengan pasal penghinaan/penodaan terhadap agama yang dianut dan diakui pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, sikap kehati-hatian perlu dilakukan pemerintah dalam menangani kasus yang dianggap menodai suatu agama yang dianut di Indonesia.⁷

Menurut Wirjono Prodjodikoro yang dimaksud, Tindak pidana terhadap kepentingan agama sering disebut dengan penodaan agama. Aspek mengenai tindak pidana terhadap kepentingan agama tersebut diatur dalam KUHP dengan tujuan melindungi kepentingan agama. Di Dalam KUHP ada tiga kepentingan yang dilindungi

⁵ Rohidin, 2011, *Problematika Beragama di Indonesia : Praktek Masyarakat Terhadap Otoritas Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jurnal Hukum No.1 tahun Vol .18, hlm 4.

⁶ Moeljatno., *Kitab Undang – undang Hukum Pidana*, Jakarta, PT Bumi Aksara , 2008.

⁷ Ahmad Najib Burhani, *op. cit.* halaman 25.

yaitu kepentingan individu, kepentingan masyarakat dan kepentingan negara yang masing-masing diperinci ke dalam sub jenis kepentingan lagi.⁸

Menurut Penetapan Presiden (Penpres) No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan agama dalam penjelasannya pasal demi pasal dijelaskan bahwa agama-agama yang dianut oleh sebagian besar penduduk Indonesia adalah: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Serta menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 97/PUU-XIV/2016 maka agama-agama dan kepercayaan lain yang boleh tumbuh dan berkembang di Indonesia adalah keenam agama dan kepercayaan yang akan diatur lebih lanjut oleh pemerintah pasca putusan MK tersebut, yang baru ditetapkan dan diakui seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.⁹

Sebagai contoh kasus Tindak Pidana Penistaan Agama yang dilakukan seseorang terhadap suatu agama lain yang sangat jelas adalah kasus mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau (Ahok). Kasus penistaan agama yang dilakukan Ahok, bermula saat dirinya memberikan pidato kunjungan kerja di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu pada 27 September 2016. Dalam pidatonya, Ahok dianggap menghina agama lewat komentarnya soal Surat Al-Maidah ayat 51. Ahok menganggap banyak orang yang 'dibohongi' oleh surah tersebut dengan tidak boleh memilih pemimpin nonmuslim. Akibat dari pernyataannya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor 1537/Pid.B/2016/PN.JktUtr. tersebut Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Eresco, 1986 hal 6.

⁹ Rohidin, *op. cit.* halaman 5.

divonis dua (2) tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim, putusan hakim lebih berat dari tuntutan jaksa yaitu satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun. Majelis Hakim menyatakan Ahok terbukti bersalah secara sah karena telah melanggar Pasal 156a KUHP tentang penodaan agama.¹⁰

Hukum pidana memuat ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang sebagai tindak pidana, masalah pertanggungjawaban serta ancaman sanksinya yang dapat terwujud dalam berbagai peraturan perundangan hukum pidana. Dalam rangka memberikan perlindungan hukum atas adanya kepentingan hukum bagi setiap warga negara tersebut, maka ketentuan tentang delik penodaan terhadap agama harus diatur dalam RUU KUHP. Oleh karena itu perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai delik agama harus direkonstruksi dan di reevaluasi kembali sehingga delik agama dapat ditangani secara profesional dan proporsional oleh aparat penegak hukum. Dengan demikian negara Indonesia yang multi agama, multi etnik dan multi ras dapat terhindar dari hal-hal menghancurkan khususnya konflik-konflik antar umat beragama. Dengan demikian sifat perjuangan dalam mewujudkan tegaknya HAM di Indonesia itu tidak bisa dilihat sebagai pertentangan yang hanya mewakili kepentingan suatu golongan tertentu saja, melainkan menyangkut kepentingan bangsa Indonesia secara utuh.¹¹

¹⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor 1537/Pid.B/2016/PN JKT.UTR, <https://putusan.mahkamahagung.go.id>, tanggal akses 26 Maret 2018

¹¹ Bambang Sutiyoso., *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2010, hal 173.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana terurai diatas, penulis mengangkat topik pembahasan dalam penulisan skripsi dengan judul **"ANALISA TERHADAP RUMUSAN TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA"**

B. Perumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diuraikan oleh Penulis dalam penulisan hukum ini adalah :

1. Bagaimanakah perbandingan rumusan Tindak Pidana Penistaan Agama dalam KUHP dan dalam RUU KUHP?
2. Bagaimana rumusan Tindak Pidana Penistaan Agama dalam perspektif pembaharuan hukum pidana pada saat ini ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini, penelitian yang dilakukan untuk membahas permasalahan tersebut mempunyai tujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah Rumusan Tindak Pidana Penistaan Agama yang ada di dalam Pasal 156a KUHP dan Pasal 348 R-KUHP
2. Untuk mengetahui rumusan Tindak Pidana Penistaan Agama dalam perspektif pembaharuan hukum pidana pada saat ini.

D. Manfaat Penelitian

Tiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Untuk itu suatu penelitian setidaknya mampu memberikan manfaat praktis pada kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling

berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat :

1. Manfaat Akademis

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek di lapangan.
- b. Sebagai wahana untuk mengembangkan wacana dan pemikiran bagi peneliti.
- c. Untuk mengetahui secara mendalam mengenai Tindak Pidana Penistaan Agama
- d. Menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pada umumnya dan pada khususnya tentang permasalahan terkait pasal 156a KUHP.
- b. Untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas tentang Tindak Pidana Penistaan Agama
- c. Hasil penelitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis, khususnya di bidang praktisi.

3. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terkait Analisa rumusan Tindak Pidana Penistaan agama.

- b. Dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau peneliti lain yang ingin mengkaji secara mendalam tentang keabsahan peraturan berkaitan dengan masalah yang penulis utarakan diatas.

E. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini penulis mampu memberikan masukan terhadap pemerintah dalam melakukan tindakan represif agar tidak terjadi Tindak Pidana Penistaan Agama serta untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Malang.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai ialah metode pendekatan Yuridis Normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka untuk membandingkan Pasal 156a KUHP dan Pasal 348 RUU KUHP.

2. Jenis Bahan Hukum

a. Bahan Hukum primer

Bahan Hukum Primer diperoleh dari studi pustaka berupa Peraturan jurnal-jurnal ,buku-buku, makalah, atau sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penulisan hukum ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat membantu memberikan petunjuk atau penjelasan maupun pelengkap bahan hukum

primer dan sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan lain sebagainya.

3. Metode pengumpulan Bahan Hukum

Penelusuran Pustaka

Penelusuran Pustaka adalah pengumpulan data yang dilakukan secara studi kepustakaan dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tujuan penelitian, Penelusuran Kepustakaan terbagi menjadi :

1) *Manual library*

Manual library adalah penelusuran bahan hukum secara manual melalui peraturan perundang – undangan maupun literature.

2) *Digital library*

Digital library adalah penelusuran bahan – bahan hukum secara digital melalui *soft file* yang ada didalam suatu website.

4. Metode Analisa

a. Studi Perbandingan

Penelitian komparasi adalah penelitian yang dilakukan untuk membandingkan suatu variabel (objek penelitian), antara subjek yang berbeda atau waktu yang berbeda dan menemukan hubungan sebab-akibatnya.

b. *Content Analality* (analisis isi pasal)

Adalah penelitian yang bersifat pembahasan lebih mendalam terhadap suatu *content* yang dalam hal ini adalah pasal 156a KUHP dan Pasal 348 RUU KUHP.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi deskripsi atau uraian tentang bahan-bahan teori, doktrin atau pendapat sarjana, dan kajian yuridis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, kajian terdahulu terkait topik atau tema yang diteliti

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang telah dikaji dan dianalisa secara sistematis berdasarkan pada kajian pustaka sebagaimana dalam Bab II

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diangkat